BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu proses kemajuan teknologi yang terjadi sangat cepat sehingga data, informasi dan pengetahuan dapat disebarluaskan di masyarakat. Pemerintah merencanakan program disektor ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkompeten, berkualitas, berdaya dan mandiri. Dalam sasaran yang diupayakan melalui program pengembangan media informasi dan teknologi masyarkat di bidang pemberdayaan. Adanya teknologi ini sangat berpengaruh di masa pemerintah modern saat ini dalam upaya melayani masyarakat, Penyebaran informasi melalui internet pada era sekarang begitu sangat cepat dengan informasi berbasis website. Penyebaran informasi melalui situs website meningkatkan daya tarik suatu informasi bagi masyarakat.

Pelaksanaan Collaborative Governance dalam keberadaan informasi berbasis web ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran media teknologi terhadap pengenalan potensi wisata. Adanya kolaborasi dalam penerapan website ini untuk membantu pemerintah Kecamatan Ngebel sebagai sektor utama dengan mengelola sektor pariwisata yang dibantu oleh akademisi sebagai proses penyampaian informasi menggunakan system teknologi web dengan melihatkan profil berbagai wisata desa. Penerapan tersebut sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas wisata melalui pengembangan sistem dan usaha para pelaku vendor yang efisien serta menguntungkan wawasan lingkungan wisata. Adanya tata kelola yang terkoordinasi dengan memanfaatkan sistem website, potensi pariwisata banyak mendapat perhatian tentang pentingnya mengelola sumber daya dan mengembangkannya menjadi pariwisata dan diapresiasi secara luas oleh para wisatawan. Dalam perkembangannya, pariwisata memiliki beberapa bentuk, salah satunya adalah pariwisata yang berfokus pada wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan dalam pengembangannya.

Collaborative Governance ini awalnya masih dalam bentuk ide yang akhirnya dibentuknlah sebuah kerjasama dengan beberapa aktor dan steakholder. Hal tersebut sejalan dengan paradigma Governance dalam administrasi Negara yaitu mendorong sebagian peran pemerintah kepada kelompok lainnya untuk

membangun kerjasama dalam tata kelola good governance. Dalam penerapan terjadi adanya kesempurnaan yaitu *Collaborative Governance* bahwa institusi public atau pihak-pihak berkepentingan dalam pelaksanaan dan sasaran suatu tujuan atau program harus melibatkan partisipasi dalam leksanakan penerapan tersebut. Dengan adanya penerapan kolaborasi yang ada di kecamatan Ngebel dapat lebih mendongkrak potensi wisata desa perkembangan teknologi sangat bermanfaat bagi pertumbuhan kelanjutan sektor wisata yang ada didesa. Keberadaan desa wisata ini berpengaruh terhadap pemerintah untuk meningkatkan pemerataan ekonomi di pedesaan.

Peraturan Kementerian Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman destinasi wisata berkelanjutan, bahwa pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang (Peraturan menteri pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan , 2016). Potensi wisata desa harus dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam hal tersebut Dinas Pariwisata sebagai lembaga terdepan harus menyelenggarakan industri pariwisata (Mutaqin, 2017).

Pembuatan website ini membutuhkan bentuk konsep *Collaborative Governance*. Hal tersebut dikarenakan dalam penerapan pengembangan wisata diperlukan adanya sinergi dari beberapa steakholder dan para sektor pendukung. Untuk mendukung percepatan pengembangan website tersebut kerja sama yang baik antar pemerintah, akedemisi, dan masyarakat dapat membangun inovasi dengan meciptakan interaksi dan komunikasi yang saling mendukung. Sehingga *Collaborative Governance* ini mengajak beberapa actor yang dapat mendukung pengembangan website tersebut (La Ode Syaiful Islamy 2018). Dengan mengajak beberapa aktor-aktor di dalamnya dikenal dengan konsep pembangunan berbasis Collaborative Governance. Penerapan Collaborative Governance sebagai pusat informasi di Kecamatan Ngebel, membangun pasrtisipasi masyarakat melalui penggunaan teknologi berbasis website. Kecamatan Ngebel mengembangkan sektor pariwisatanya melalui wisata potensi desa. Yang berkesinambungan terhadap wisata alamnya dan suasana pedesaan sebagai daya tarik utama wisatanya dengan tidak mengabaikan sisi kenyamanan. Kolaborasi dan koordinasi antar berbagai state terkait dalam pengembangan website ini sangat penting dan merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengembangan pariwisata saat ini. Kolaborasi dan

koordinasi antar state yang berbeda, mulai dari informasi sampai dengan bentuk kerjasama yang formal maupun informal. Disisi lain ruang lingkup kerjasama sangat luas meliputi seluruh proses pengembangan pariwisata, mulai dari perencanaan wilayahdan lokasi hingga pelaksanaan kegiatan termasuk sampai kepada pemantauan sehingga tujuan tercapai secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat setempat khususnya, sebagaimana konsep pembuatan website tersebut.

Kolaborasi dalam pembuatan website tersebut, diharapkan kawasan wisata makin populer dalam pengexsploran potensi wisatanya. Oleh karena itu kolaborasi antar steakholder pemerintah, akedemisi, dan masyarakat dalam pengembangan website wisata lebih menekankan secara terperinci konsep *Collaborative Governance*. Konsep tersebut muncul dimana saat ini masyarakat semakin berkembang sehingga membutuhkan kolaborasi dengan actor-aktor eksternal. Menciptakan keinginan melakukan kolaborasi ini muncul karena para actor menyadari adanya keterbatasan, sehingga actor tesebut menjali hubungan yang erat dengan actor lainnya. Maka hal tersebut akan menghasilkan outcome yang diinginkan bersama.

Dalam penerapan *Collaborative Governance* ini membentuk sinergi yang baik dari ketiga aktor bisa disebut dengan model kerja sama triple helix (Rasdi, Didi 2019). Konsep ini merupakan interaksi antara aktor akademisi, pemerintah dan para penyedia jasa (vendor). Dalam konteks ini para aktor mendorong tumbuhnya kreativitas suatu kolaborasi dalam pembuatan website tersebut bebasis collaborative governance. Dengan adanya kreativitas tersebut menambah skill dan pemunculan ide baru dalam pengembangan wisata desa. Hubungan yangbaik dan saling mendukung antara ketiga aktor akan sangat membantu menghasilkan pengembangan website yang baik untuk menjadikan pusat informasi wisata yang ada di Kecamatan Ngebel.

Dalam penelitian terdahulu berjudul *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan Di Kabupaten Kulon Progo berkesimpulan bahwa pembangunan wisata berkelanjutan salah satu *penerapan sustainable development goals* untuk menciptakan periwisata yang ramah dengan lingkungan hingga dapat di manfaatkan oleh masyarakat setempat local dalam mengurangi tingkat penganguran wisata. Wisata Kebun Teh Nglinggo Kabupaten Kulon Progo salah satu sumber pendapatan untuk masyarakat lokal dengan tingkat wisatawan

berkunjung ke periwisata hingga juga meningkatan pendapatan masyarakat. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa publikasi dalam media sosial daya tarik media sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia sekarang. Media sosial bagaikan teknologi informasi yang cepat dan akurat guna meningkatkan daya tarik pengunjung sehingga menaikan wisatawan dan dapat berdaya saing wisata yang lain (Surya 2021).

Dalam penelitian kedua yang berjudul Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang berkesimpulan akses sumber daya telah tercapai dalam penerapan pengelolaan bersama di Desa Wisata Kementul. Desa Kementul didukung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dan memiliki mahasiswa dari Salatiga. Selain itu, Pokdarwis memiliki program untuk mengadakan workshop dan study tour ke desa-desa wisata yang dikembangkan. Kajian tersebut menyatakan bahwa Desa Wisata Kemetul telah menjadi panutan dan memiliki faktor keberhasilan dalam tata kelola bersama untuk mendorong partisipasi masyarakat. Komitmen terhadap Tujuan Kurangnya komitmen perlu meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dengan pemahaman yang sama tentang tujuan dan tanggung jawab masing-masing individu (Utami, Hariani, and Sulandari 2020).

Penelitian ketiga yang terakhir berjudul Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok bahwa pembangunan dan pengelolaan pantai Lakban pemerintah tidak saling bekerjasama dengan masyarakat melainkan hanya pihak pemerintah saja yang mengelola didalamnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahap pelaksanaan kegiatan juga terbilang cukup baik, maka tata kelola pemerintah daerah kabupaten Minahasa Tenggara dalam pengaturan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat. Diharapkan harus lebih tegas lagi dan lebih konsisten dalam menjalankan tugas dan kewajiaban (Tongkotow, Waworundeng, and Kimbal 2021).

Dari kesimpulan pada peneliti terdahulu Collaborative Governance beberapa belum optimal dalam menjalankan tugasnya. Karena adanya faktor penghambat dari kurangnya pengetahuan dan sumber daya manusia masyarakat yang kurang memahami pemberdayaan tersebut. Urgensi *Collaborative Governance* tersebut muncul tidak begitu saja melainkan dilatarbelakangi melalui aspek yaitu dari aspek kebutuhan akademisi untuk melakukan kerjasama antar pemerintah, karena

keterbatasan kemampuan tiap aktor untuk melakukan program, kolaborasi juga muncul lantaran keterbatasan anggaran dari suatu lembaga, sehingga dengan adanya kolaborasi anggaran tidak hanya berasal dari satu lembaga. Muculnya konsep *Collaborative Governance* yang menekankan keterlibatan beberapa aktor seperti akademisi, pemerintah dan penyedia jasa dalam penyelanggaraan penerapan website ini. Kompleksitas ini mucul pada perkembangan pembuatan yang berakibat pada kondisi saling ketergatungan antara institusi dan meningkatkan permintaan kolaborasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang disampaikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan antara lain: Bagaimana penerapan *Collaborative Governance* pusat informasi wisata Ngebel melalui website dolanngebel.com?

C. Tujuan Penelitian

Agar peneliti dapat lebih focus dan tepat sasaran, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan kolaborasi pengembangan website dolanngebel.com sebagai informasi wisata Kecamatan Ngebel
2. Untuk memahami pengembangan website dengan system collaborative governance di lingkungan pemerintah kecamatan melalui pengoptimalan kegunaan teknologi informasi

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang peneliti ingin capai diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapaun manfaat dari studi penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Keunggulan teoritis menunjukkan bahwa hasil penelitian ini memungkinkan penerapan Collaborative Governance sebagai pusat informasi wisata Ngebel melalui website.
2. Manfaat praktis diharapkan dapat memperdalam pemahaman bagi :
   a) Pelaku pihak penyedia jasa website dalam informasi wisata secara efektif dengan system aplikasi berbasis website
   b) Peran berbagai actor collaborative governance sebagai bentuk kolaborasi kepada masyarakat desa dalam mengelola sumber daya manusia.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah penjabaran mengenai istilah-istilah penting yang dijelaskan dalam penelitian ini. Penegasan istilah berguna untuk membantu mendefinisikan maksud dari istilah-istilah tersebut :

1. Website

Website adalah layanan informasi yang memudahkan pengguna internet dalam mencari informasi. Disajikan sebagai halaman web dengan menggunakan konsep multimedia, informasi dapat disajikan dalam berbagai media seperti teks, gambar, animasi, suara atau film. Website adalah sebuah sistem untuk mengakses informasi di internet (Kadir, 2014). Penggunaan teknologi website terdiri dari halaman-halaman yang saling berhubungan. Sedangkan definisi lain mengatakan bahwa website adalah rangkaian atau beberapa halaman web di internet yang memiliki topik-topik terkait untuk menampilkan informasi.

2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan atau mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan utnuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun.

3. Potensi Desa

Potensi desa adalah kemampuan desa yang masih belum terlihat atau kemampuan desa yang perlu dikembangkan dalam tujuan penguatan ekonomi masyarakat desa. Dengan desa ini, potensi termasuk kekuatan, kapasitas dan kemampuan desa dapat dikembangkan untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini dapat menjadikan wisata desa bagi dinamika masyarakat desa tersebut serta dapat mempromosikan untuk memberikan tambahan nilai ekonomi dari wilayah desa.

4. Collaborative Governance

Collaborative govenance adalah suatu kesepakatan atau peraturan yang mengatur berbagai lembaga publik dan kelompok kepentingan non-pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan formal. (Afful-Koomson, 2013). Collaborative governance yang dimaksud di dalam penelitian tersebut adalah keterlibatan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah Kabupaten, Akademmisi,

tokoh masyarakat dan steakholders yang lain dalam rangka mengembangkan serta memajukan sector wisata desa melalui website di Kecamatan Ngebel.

F. Landasan Teori

1. Collaborative Governance

   a. Pengertian Collaborative Governance

Collaborative Governance terdiri dari dua kata, " collaborative" dan governance. Collaborative Governance merupakan aktivitas yang ada di dalamnya untuk melibatkan kepentingan berbagai pihak untuk tercapainya tujuan dan pemahaman bersama (Subarsono, 2016). Collaborative Governance dapat dikatakan sebagai salah satu dari tipe governance. Konsep ini menunujukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan aktor publik yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu akademisi bukanlah suatu yang terpisah dan bekerja secara sendiri-sendiri melainkan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat. Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapain tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent.

Menurut (Ansell, 2007) *Collaborative Governance* didefinisikan sebagai berikut :

Collaborative governance adalah suatu pengaturan dimana satu atau lebih otritas publik untuk menerapkan secara langsung stakeholder non-state di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset.

Disamping pendapat tersebut, pendapat lain mengenai *Collaborative Governance* dikemukakan Agranoff dan McGuire dalam (Chang, 2009) menyatakan :

Secara khusus, tata kelola kolaboratif sangat menekankan pada kolaborasi horizontal secara sukarela dan hubungan horizontal antara anggota multi-sektoral, karena persyaratan pengguna melebihi kemampuan dan peran satu organisasi publik tunggal, dan interaksi antara berbagai organisasi yang terlibat dan terkait dalam kegiatan publik diperlukan. Kolaborasi diperlukan untuk membangun *Collaborative Governance* secara efektif memenuhi tuntutan yang muncul dari pengelolaan pemerintah, organisasi, dan sektor.

Defisini collaborative governance dari kedua ahli pada ide yang sama. Namun penjelasan Ansell dan Gash menunjukkan bahwa aspek kolaboratif penyelenggaraan pemerintahan lebih relevan dengan aspek kebijakan public atau institusi public, dalam hal ini pengembangan dan pelaksanaan program pemerintah. Selain itu, kerjasama praktis dalam penyelenggaraan pemerintah harus mendukung nilai musyawarah dan kesepakatan antara semuah pihak atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Collaborative governance atau kolaborasi penyeggaran pemerintahan dalam lingkup yang lebih general yakni penyelenggraan pemerintahan secara keseluruhan.

Collaborative Governance dalam hal ini lebih menitikberatkan pada aspek sukarela dalam praktik kolaboratif. Diharapkan aspek kesukarelaan tersebut setiap aktor yang baik pemerintah derah dan Akedimisi yang terlibat dalam kolaborasi bekerja paling baik untuk mencapai tujuan kolaborasi mereka. Program atau kebijakan yang dilaksanakan lebih efektif karena melibatkan hubungan pemerintah atau instansi.

b. Tujuan Collaborative Government

Kolaborasi dalam pengembangan website tersebut pemerintahan dan akedemisi adalah suatu bentuk yang diharapkan dalam praktik berjalannya teknologi sekarang ini. Ada sebagaian pemikiran yang menjadi alasan adanya kolaborasi pemerintah desa dan akedemisi. Collaborative governance tidak muncul secara tiba-tiba karena hal tersebut ada disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh public (Junaidi, 2015). Collaborative Governance atau kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi terhadap regulasi.

Pendapat di atas menyatakan bahwa collaborative governance muncul tidak begitu saja melainkan dilatar belakangi berbagai aspek. Collaborative governance dapat dilihat dari aspek kebutuhan dari institusi untuk melakukan kerjasama antar lembaga, karena keterbatasan kemampuan tiap lembaga untuk melakukan program atau kegiatannya sendiri. Selain itu, kolaborasi juga muncul lantaran keterbatasan dana anggaran dari suatu lembaga, sehingga dengan adanya kolaborasi anggaran tidak hanya berasal dari satu lembaga saja, tetapi lembaga lain yang terlibat dalam kolaborasi. Kolaborasi pun juga bisa dikatakan

sebagai aspek perkembangan dari ilmu pemerintahan, terutama dengan munculnya konsep Collaborative Governance yang menekankan keterlibatan beberapa aktor seperti Akedemisi, pemerintah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah.

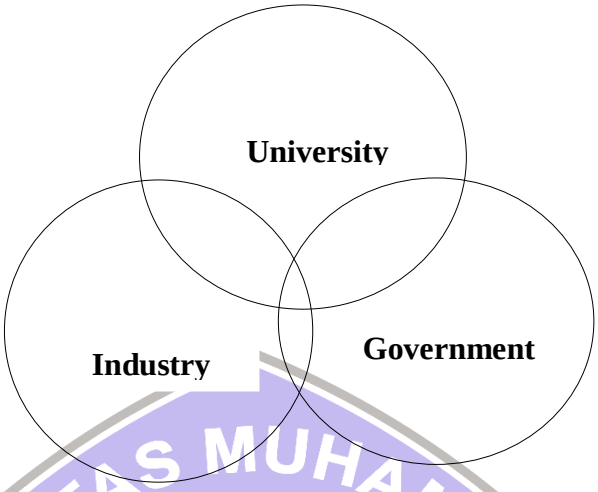

Gambar 1.1 Bagan Collaborative Government

(Sumber : (Etzkowitz, 2000)

Dari kesimpulan bagan diatas bisa dikatakan kerjasama ini dilakukan karena rumitnya kerjasama antar lembaga. Selain itu, diperkirakan kolaborasi muncul karena adanya kesamaan kepentingan antara masing-masing kelompok. Memungkinkan kolaborasi untuk memobilisasi pemangku kepentingan. Selain ini kolaborasi juga dianggap sebagai bentuk pengembangan website untuk memajukan sector wisata desa Kecamatan Ngebel.

c. Proses Collaborative Governance

Proses dari suatu kolaborasi dilakaukan dalam beberapa tahapan. Suatu tahapan model kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek pengelolaan suatu urusan public

1. *Face to face dialogue*

   Bentuk collaborative governance dimulai dengan dialog tatap muka dengan masing-masing state yang terlibat. Dialog secara langsung dapat meminimkan permusuhan dan penghinaan bagi para aktor kepentingan yang terlibat. Hal ini memungkinkan para aktor kepentingan untuk bekerjasama sesuai dengan tujuan dan manfaat bersama.

2. *Trust building*

   Trust Building harus dilakukan pada saat proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini dilakukan agar para pemangku kepentingan tidak mengalami egosentrisme antar lembaga. Oleh karena itu, membangun kepercayaan ini membutuhkan pemimpin yang menyadari pentingnya bekerja sama.

3. *Commitment to process*

   Untuk menghindari risiko dari proses kolaborasi, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Mengerjakan kolaborasi tentu rumit. Keterlibatan adalah tanggung jawab pemangku kepentingan yang melihat hubungan sebagai sesuatu yang baru dan perlu mengembangkan tanggung jawab ini.

4. *Share Understanding*

   Tahap kolaborasi, state yang terlibat harus saling bertukar pemahaman mengenai apa yang dapat mereka (state) dapat melalui kerjasama yang direncanakan. Saling bertukar pemahaman dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, obketivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain.

5. *Intermedieated Outcome*

   Merupakan hasil sementara dari proses yang sedang berlangsung yang memberi manfaat dan bernilai strategis.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah bagian yang menjelaskan mengenai variable yang ada di teori. Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep atau variable agar dapat diukur dengan cara melihat indicator suatu konsep atau variable (Noor 2016). Definisi operasional dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana *Collaborative Governance* dalam pengembangan website

dolanngebel.com dalam pengembangan potensi wisata desa Ngebel. Sehinga penelitian ini mempunyai indicator pengembangan Collaborative Governance yaitu sebagai berikut :

a. Proses *Collaborative Governance* pengembangan website

   Proses suatu kolaborasi yang dilakukan dalam bebrapa tahapan, Tahapan kolaborasi ini penting untuk membentuk suatu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa aktor.

b. Inisiatif awal dalam kolaborasi pengembangan website

   Kolaborasi dibentuk atas dasar ide dari berbagai aktor yang mendorong kerjasama dalam membuat suatu tujuan.

c. Strategi dalam kolaborasi pengembangan website

   Kolaborasi terbentuk dengan adanya sebuah rencana strategi dalam aspek perencanaan kerjasama.

d. Aktor keterlibatkan dalam *Collaborative Governance*

   Proses kolaborasi yang telibat memunculkan beberapa aktor dalam sebuah perencanaan kerjasama yang membentuk sebuah komitmen bersama.

e. Faktor pendukung dan penghambat dalam *Collaborative Governance*

   Hal-hal yang dapat mednukung dan mendorong *Collaborative Governance* dan kendala dalam proses *Collaborative Governance.*

H. Metodelogi Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hakikat dari penelitian kualitatif adalah bahwa metode penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa tulisan atau lisan orang, serta tindakan serta upaya untuk memecahkan masalah dengan cara menggambarkan peristiwa berdasarkan fakta atau bukti yang ada. Inti dari penelitian ini adalah deskriptif yang selaras dengan pendapat (Sugiyono, 2017) yaitu penelitian yang mengungkapkan atau memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Ngebel dipilih sebagai penelitian merupakan salah satu bentuk obyek wisata yang terkenal di Ponorogo, tidak hanya itu berbagai potensi desa juga banyak sumber wisata yang belum pernah wisatawan ketahui. Maka dari itu instansi pemerintahan yang bekerjasama dengan Akedemisi serta masyarakat dalam hal penerapan *Collaborative Governance m*melalui website kepada masyarakat desa yang memiliki potensi.

3) Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informasi penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfat untuk penelitian yang dilakukan. Pemilihan informan pada penelitian ini yaitu dengan teknik purposive sampling.

Teknik purposive sampling yang digunakan dalam pemilihan informan Untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih tepat, membutuhkan informan yang memahami bahwa hal tersebut berkaitan langsung dengan masalah penelitian . Oleh karena itu, informan yang peneliti maksud adalah:

:

No.	Nama	Alasan
1.	Dwi Cahyanto, SH, M.Si	Selaku Bapak Camat Kec. Ngebel yang ikut melaksanakan dan mendukung Collabirative Governance dalam strategi pengembangan potensi wisata desa berbasis website
2.	Fibi Chandra P, S.Sos	Pihak pemerintah Kecamatan Ngebel yang memiliki tugas untuk berhadapan dengan pelaku usahadan mengetahui seluk beluk Wisata Ngebel.

3.	Dian Suluh Kusuma Dewi dan Insyira Y. Azhar	Selaku pihak penting dalam praktek Collaborative Governance karena ide awal pembuatan website dolanngebel.com dari akedemisi tersebut.
4.	Bahrudin M. Habib	Membantu perancang desain website dolanngebel.com
5.	Masyarakat Kec. Ngebel : Ibu Anies (RM Anies Ngebel)	Mendukung adanya pengembangan website untuk meningkatkan kerja sesuai fungsinya dan mengenalkan berbagai usaha mulai dari rumah makan, penginapan, serta wisata desa. Selaku pemilik usaha rumah makan yang sudah memakai website dolanngebel.com sebagai media promosi tempat makan
6.	Mas Febri (Penginapan Tlogorejo2)	Selaku penjaga penginapan Tlogorejo2 yang juga sudah memakai website dolanngebel.com dan sejauh ini website sudah berjalan karena terdapat beberapa reservasi yang menghubungi pihak vendor untuk memesan penginapan untuk bermalam bersama keluarga
7.	Ibu Erna (Kedai Pos Ketan)	Selaku pemilik kedai pos ketan yang juga sudah memakai website dolanngebel.com untuk mempromosikan menu-menunya, dan menarik pelanggan yang ingin berwisata kuliner.

4) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah objek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data :

a. Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertama. Sumber data utama untuk survey primer dalam penelitian ini adalah pemerintahan desa, Akademisi, masyarakat.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari peneliti untuk mendukung sumber primer. Dapat juga dikatakan data bahwa data tersebut tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang berhubungan langsung dengan sasaran surevi diwilayah Kecamatan Ngebel.

5) Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai pengaturan, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2017). Burhan Bungin menemukakan bahwa metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian (Bungin, Metode Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif, 2001). Dalam hal ini, memerlukan teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dengan cepat dan akurat, tergantung pada masalah yang diselidiki dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode yang dapat mempermudah penelitian ini, antara lain :

a. Metode Observasi

Observasi adalah suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif untuk mengamati dan mendengar interaksi atau fenomena yang terjadi (Widi, 2010). Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang mengumpulkan data penelitian melalui observasi. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung bagaimana proses pembuatan website didukung oleh para ulama yang mewakili pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Ngebel. Peneliti juga mengamati kebutuhan dan kejadian tergantung pada situasi yang sebenarnya, baik di dalam maupun di luar proses kegiatan.

b. Metode Wawancara

Wawancara dalam survei penelitian bertujuan untuk mengumpulkan informasi, merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan). Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi responden melalui percakapan langsung dan tatap muka. Wawancara atau interview adalah proses dimana memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai (Bungin, Metode Penelitian Sosial, 2011). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan beberapa masyarakat Desa Gondowido, Desa Ngebel, Desa Ngrogung, Desa Pupus, Desa Sahang, Desa Sempu, Desa Talun, Desa Wagir Lor Kec. Ngebel, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan data yang lebih relevan.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen. Dokumentasi itu sendiri tujuannya untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan berupa keterangan dan hal-hal yang membuktikan adanya suatu kegiatan yang didokumentasikan.

6) Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan setelah perolehan data dan dilakukan secara mendetail baik di dalam maupun setelah di lapangan. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang dihasilkan adalah teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman : kondensasi data (data condensation), tampilan data (data display), dan inferensi atau validasi (conclusion).) (Miles, 2014)

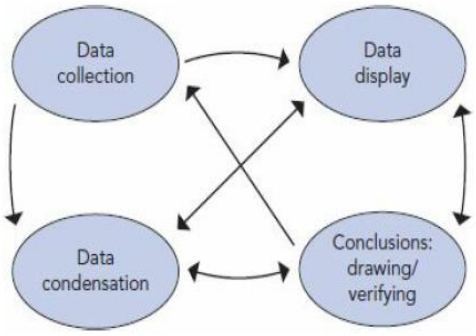

Gambar 1.2 Analisa data dalam penelitian menurut Miles 2014

(*Sumber :* (Miles, 2014)

Berikut penjelasan langkah-langkah tersebut :

a. Pengumpulan data.

   Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data ini dilakukan selama jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan validasi data.

b. Kondensasi data (Data Condensation)

   Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhankan, mengabstraksi dan mentransformasikan data yang terdapat pada catatan lapangan dalam penelitian.

c. Penyajian data

   Langkah selanjutnya setelah kondensasi data adalah penyajian data. Sekumpulan yang menyatakan hubungan antara kategori informasi yang merepresentasikan data kualitatif. Selanjutnya dengan membuat deskripsi detail tentang kasus tersebut dan lingkungannya.

d. Penarikan kesimpulan/Verifikasi tahap akhir dari analisis data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Dengan demikian proses verifikasi merupakan upaya mencari makna dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan persamaan, perbedaan-perbedaan, hal-hal yang sering muncul, dan lain-lain.

7) Uji Keabsahan Data

Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menguji dan menetapkan validitas melalui analisis dari berbagai perspektif. Validitas penelitian kualitatif adalah apakah hasil penelitian secara akurat mencerminkan keadaan yang didukung oleh bukti-bukti. Menurut (Fauziyah, 2015) triangulasi didefinisikan sebagai kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mempelajari fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan prespektif yang berbeda. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survey. Untuk mendapatkan kebenaran informasi yang benar dan gambaran besar dari informasi tertentu, peneliti dapat memverifikasi kebenarannya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO